

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh otoritas moneter atau bank sentral dengan cara pengendalian besaran-besaran moneter untuk mencapai keadaan dan perkembangan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi) dan membaiknya perkembangan *output riil* (pertumbuhan ekonomi). (Perry Warjiyo dan Solikin, 2003:61).

Sejak diamanatkan oleh UU No.23/1999 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Bank Sentral Republik Indonesia, yaitu Bank Indonesia (BI) pada tahun 2000, tujuan kebijakan moneter domestic BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam pelaksanaannya, kestabilan nilai rupiah diterjemahkan dalam suatu tingkat inflasi yang rendah dan tidak berfluktuasi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam memformulasikan kebijakan moneter, bank Indonesia memerlukan berbagai Informasi yang berkaitan baik dengan pembentukan proyeksi variabel-variabel ekonomi maupun dengan proses transmisi kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan sektor riil.

Sebelum periode pemberlakuan UU Bank Sentral, instrumen utama kebijakan moneter yang digunakan adalah jumlah uang beredar, namun pada tahun 2000 BI mulai mengenalkan suatu sistem baru dimana inflasi menjadi sasaran tunggalnya, kebijakan ini lebih dikenal dengan nama *Inflation Targeting Framework* (ITF). Secara praktis, penerapan ITF dilakukan dalam dua periode, periode persiapan (2000.01 – 2005.06) dan periode pelaksanaan (2005.07 - Sekarang).

Inflation Targeting merupakan suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang mempunyai ciri-ciri utama berupa adanya pernyataan resmi dari bank sentral bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah, serta pengumuman target inflasi kepada publik.

Menurut Junggun Oh¹ (2000). *Inflation Targeting* adalah sistem dari operasi kebijakan moneter yang mana bank sentral telah menetapkan sasaran inflasi dengan sebelumnya telah menetapkan angka yang akan datang dan dibuat menggunakan instrument kebijakan yang tersedia yang ada terlebih dahulu untuk mencapai sasaran. Sebagai suatu strategi kebijakan moneter (Rick Mishkin dalam papper Stephen Grenville, 2000),² *Inflation Targeting* meliputi lima komponen utama:

1. Pemberitahuan publik tentang target angka pencapaian jangka menengah untuk inflasi.
2. Persetujuan institusioanal untuk kestabilan harga sebagai tujuan utama dari kebijakan moneter, untuk tujuan lain itu setelahnya.

¹ Junggun Oh. 2000. *Inflation Targeting : New monetary Policy Framework in Korea*. The Bank of Korea. Seol Korea. 1-54.

² Stephen Grenville. 2000. *Inflation Targeting In The World of Volatile Capital Flows*. Reserve Bank of Australia. Australia. 1-12.

3. Strategi informasi termasuk dalam pemilihan banyak variabel, dan tidak hanya agregat moneter atau nilai tukar yang digunakan untuk memutuskan pengaturan dari instrumen kebijakan.
4. Meningkatkan transparansi dari strategi kebijakan moneter siap berkomunikasi dengan masyarakat dan pasar tentang rencana, sasaran dan keputusan dari kegiatan moneter.
5. meningkatkan akuntabilitas dari bank sentral untuk pencapaian sasaran inflasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan sejumlah bank-bank sentral di dunia menggunakan *Inflation Targeting* dalam kerangka kebijakan moneter sebagai rasa ketidakpuasan terhadap penggunaan besaran-besaran moneter yang bersifat *forward looking*, dengan memfokuskan secara langsung pada kestabilan harga atau inflasi yang rendah sebagai sasaran tunggal akhir.

Pemilihan inflasi sebagai sasaran akhir ini sejalan pula dengan kecenderungan perkembangan terakhir bank-bank sentral di dunia, dimana banyak bank sentral yang beralih untuk lebih memfokuskan diri pada upaya pengendalian inflasi.

Alasan yang mendasari perubahan tersebut adalah, pertama, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi tingkat inflasi, kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi variabel riil, seperti pertumbuhan output ataupun tingkat pengangguran. Kedua, pencapaian inflasi rendah merupakan prasyarat bagi tercapainya sasaran makroekonomi lainnya, seperti pertumbuhan pada tingkat kapasitas penuh (full employment) dan penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Ketiga, yang

terpenting, penetapan tingkat inflasi rendah sebagai tujuan akhir kebijakan moneter akan menjadi *nominal anchor* berbagai kegiatan ekonomi.

Salah satu keuntungan utama dari kebijakan *Inflation Targeting* adalah bahwa kebijakan ini dapat membantu untuk mengetahui terlebih dahulu ketidaktercapaian inflasi, terutama sekali dalam menghadapi suatu waktu dari gejolak inflasi. (Bernanke et al.,1999:288 yang dikutip oleh Laurence ball dan Niamh Sheridan³, 2003:1).

Inflation Targeting Framework (ITF) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh New Zealand, dan sistem ini telah menyebar ke negara lain seperti Kanada dan Inggris hanya dalam waktu 10 tahun. Di Indonesia *Inflation Targeting* mulai diberlakukan pada Juni 2005.

Prinsip pelaksanaan *Inflation Targeting* di Indonesia adalah *framework* (kerangka), bukan merupakan *rule* (ketentuan). Atas dasar prinsip tersebut maka kebijakan moneter akan menjadi lebih fleksibel dan tidak kaku. Di dalam *Inflation Targeting* prinsip *full discretionary* dalam pelaksanaannya dituntut bersifat terbatas.

Dengan prinsip dasar tersebut, BI melaksanakan kebijakan moneter dengan elemen-elemen pokok sebagai berikut.

Pertama, suku bunga (BI-rate) digunakan sebagai sasaran operasional moneter menggantikan uang beredar. Perubahan sasaran operasional moneter ini

³ Laurence Ball dan Niamh Sheridan. 2003. *Does Inflation Targeting Matter?*. NBER. Cambridge. 1-56.

didasarkan pada pertimbangan makin lemahnya hubungan antara uang beredar dengan laju inflasi.

Kedua, kebijakan moneter diperkuat dengan strategi yang bersifat pre-emptive atau forward looking. Elemen dasar ini sekaligus merupakan tantangan besar bagi Bank Indonesia mengingat inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi yang bersifat adaptif (inertia). BI menyebutkan, misalnya sekitar 74% inflasi pada tahun 2001 dan sekitar 89% inflasi pada tahun 2004 terutama disumbang oleh ekspektasi yang bersifat adaptif. Membawa ekspektasi yang sebelumnya adaptif kepada ekspektasi ke depan dibutuhkan persyaratan pokok. Kebijakan moneter perlu konsisten terhadap sasaran akhir yang akan dicapai atau menghindari *time-inconsistency policy*. Tanpa konsistensi yang kuat, kebijakan ke depan kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Masyarakat kembali akan menggunakan ekspektasi adaptif dan/atau memberi porsi relatif sangat kecil terhadap langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh ke depan kemudian melakukan optimasi dalam pengambilan keputusannya. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa untuk menjadikan inflasi yang rendah dibutuhkan pelaksanaan ITF yang kaku dan bahkan kontraktif terhadap pertumbuhan ekonomi selama 2 – 3 tahun.

Ketiga, terkait dengan unsur kedua, pelaksanaan ITF membutuhkan komunikasi yang efektif dan transparan kepada masyarakat luas. Ini diperlukan agar langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh ke depan benar-benar dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Keempat, peningkatan koordinasi yang lebih kuat dengan Pemerintah. Elemen ini sangat penting dalam rangka pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan mengingat faktor-faktor pendorong inflasi tidak sepenuhnya berada dalam lingkup kewenangan BI. Kebijakan moneter BI relatif hanya dapat mempengaruhi stabilitas dari sisi permintaan. Sementara faktor-faktor pendorong inflasi dari sisi penawaran sebagian berada dalam kebijakan pemerintah antara lain kenaikan harga barang dan jasa yang dikendalikan oleh Pemerintah (administered price). Bahkan beberapa diantaranya tidak berada dalam kendali Pemerintah dan BI seperti harga minyak dunia yang tinggi, pelemahan nilai tukar regional, dan sebagainya. Solusi untuk melihat efektivitas kebijakan moneter diberikan dengan menggolongkan inflasi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu inflasi inti dan volatile. (Bambang Prijambodo⁴, 2006).

Dalam penetapan sasaran inflasi, BI tidak dapat menetapkannya sendiri melainkan bersama pemerintah, alasannya adalah:

1. Koordinasi dengan Pemerintah dimaksudkan agar kebijakan moneter BI sejalan dengan kebijakan umum Pemerintah dibidang perekonomian dengan tetap menjaga tugas dan wewenang masing-masing.
2. Koordinasi BI dengan Pemerintah dalam penetapan sasaran inflasi dilakukan sesuai dengan MoU yang telah disepakati antara Pemerintah (cq. Menteri Keuangan) dengan BI, diantaranya adalah:

⁴ Bambang Prijambodo. *Evaluasi Implementasi Langkah-langkah Penguatan Kebijakan Moneter dengan Sasaran Akhir Kestabilan Harga*. Bank Indonesia. Indonesia. 1-134.

- BI menyampaikan usulan Sasaran Inflasi kepada Pemerintah selambat-lambatnya bulan Mei pada tahun sebelum periode sasaran inflasi berakhir.
 - Dalam hal terjadi kondisi yang luar biasa sehingga Sasaran Inflasi yang telah ditetapkan menjadi tidak realistis dan perlu direvisi, maka BI menyampaikan usulan perubahan Sasaran Inflasi setelah berkoordinasi dengan pemerintah.
3. Pentingnya keterlibatan Pemerintah dalam menetapkan inflasi didasarkan pada pertimbangan beberapa faktor. Pertama, tidak semua sumber inflasi di bawah kendali kebijakan moneter BI. Kebijakan pemerintah turut menyumbang inflasi, diantaranya adalah penetapan *administered price*, upah minimum regional, gaji pegawai negeri, kebijakan di bidang produksi sektoral, perdagangan domestik dan tata niaga impor. Kebijakan pemerintah lainnya (misalnya di bidang politik, keamanan, dan penegakan hukum) juga secara tidak langsung turut mempengaruhi inflasi. Kedua, kebersamaan komitmen pengendalian inflasi antara Pemerintah dan BI di atas kertas akan menjadikan sasaran inflasi lebih kredibel, karena menjadi "milik bersama". Jika sasaran inflasi sangat kredibel, dalam arti BI dan Pemerintah dinilai akan mampu mencapainya, para pelaku ekonomi akan menyamakan perkiraan inflasi mereka dengan angka sasaran inflasi tersebut. Bila kondisi ini terjadi, Pemerintah dan BI akan lebih mudah menurunkan dan menstabilkan inflasi dalam jangka menengah dan panjang, tanpa harus menelan biaya kebijakan yang terlalu besar.

4. Sebagai tindak lanjut, BI bersama Pemerintah telah membentuk tim penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi (selanjutnya disebut Tim Pengendalian Inflasi) yang beranggotakan beberapa departemen teknis. Adapun tugas tim tersebut antara lain mencakup pemberian usul mengenai sasaran inflasi, mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya terhadap pencapaian sasaran inflasi, merekomendasikan pilihan kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi, serta melakukan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi kepada masyarakat. Diharapkan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi ini akan meningkatkan koordinasi antara otoritas moneter dengan Pemerintah secara keseluruhan, sehingga sasaran inflasi menjadi tujuan bersama yang credible dan achievable.
5. Koordinasi BI dengan Pemerintah juga dilakukan dalam penetapan asumsi-asumsi makro untuk bahan penyusunan RAPBN, baik melalui rapat koordinasi dengan Departemen Keuangan (dan instansi terkait) maupun dalam pembahasan dengan DPR. Koordinasi BI dengan Pemerintah mengenai kebijakan ekonomi dilakukan dalam Sidang Kabinet maupun pertemuan-pertemuan lainnya sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang terjadi.

Tabel 1. Sasaran inflasi

Tahun	Sasaran Inflasi
2006	7 % \pm 1
2007	6 % \pm 1
2008	5 % \pm 1
2009	4.5 % \pm 1

Sumber: Kebijakan Moneter Bank Indonesia (beberapa tahun penerbitan).

Dalam *Inflation Targeting* yang telah ditetapkan oleh BI, inflasi merupakan sasaran tunggal yang dijadikan tumpuan atau acuan sebagai penentu variable yang akan digunakan.

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikkan yang terjadi hanya sekali saja (walaupun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 1987:25).

Pada krisis ekonomi yang melanda dunia baru-baru ini. Secara langsung juga mempengaruhi kehidupan perekonomian, memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan inflasi. Setiap peristiwa yang cenderung mendorong naiknya tingkat harga secara umum dan terus menerus disebut gejala inflasi. Pada umumnya analisis mengenai inflasi dihubungkan melalui sektor riil dan sektor moneter. Dalam sektor riil karena inflasi mempunyai pengaruh yang besar dalam proses produksi dan permintaan barang. Sedangkan dalam moneter dianggap sebagai pemicu terjadinya inflasi.

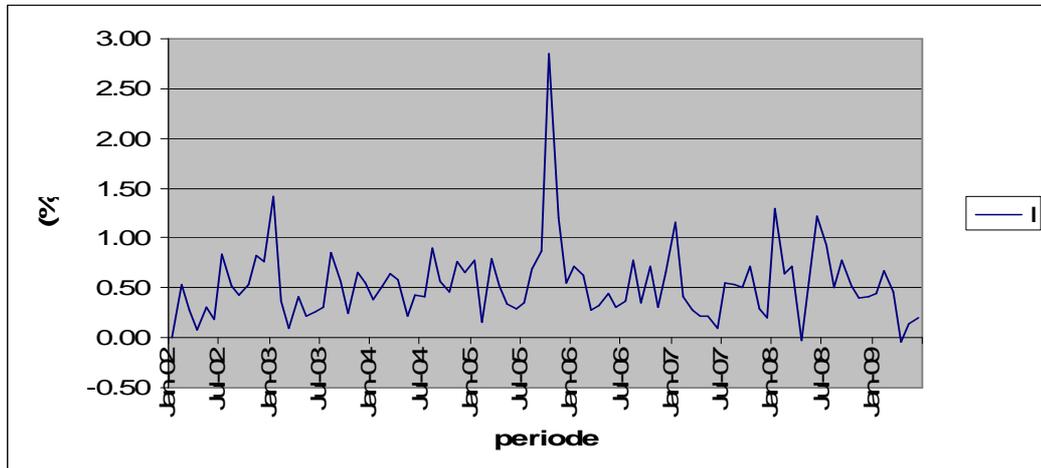
Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi yang tidak dapat dihilangkan dari negara yang berkembang, karena inflasi juga merupakan suatu indikator dalam menentukan negara tersebut berkembang atau tidak, tetapi dalam kasus ini inflasi yang dimaksud adalah inflasi yang terkendali.

Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan menyebabkan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti: (1) Inflasi yang tinggi akan menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat menurun karena harga barang-barang semakin tinggi, sehingga menimbulkan masyarakat yang miskin semakin kesulitan dalam hidupnya. (2) Inflasi yang tidak stabil akan menimbulkan keraguan pada para pengusaha yang ingin berinvestasi. Hal ini menimbulkan kegiatan perekonomian akan tertunda dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat.

Inflasi dapat dikategorikan menjadi dua yaitu inflasi umum dan inflasi inti. Inflasi umum adalah inflasi yang berdasarkan cakupan barang dan jasa yang lazimnya digunakan dalam perhitungan IHK. Inflasi inti pada dasarnya merupakan suatu tingkat inflasi IHK setelah mengeluarkan bahan makanan yang harganya sangat berfluktuatif (*volatile foods*), dan barang-barang yang harganya banyak ditentukan pemerintah (*administered goods*). Inflasi inti juga digunakan oleh BI untuk menjadi acuan dalam mengambil kebijakan moneter, hal ini dikarenakan inflasi inti dapat memberikan signal yang tepat dalam memformulasikan kebijakan moneter.

Perkembangan tingkat inflasi inti (*core inflation*) selama periode 2002:01-2009:06 disajikan pada Gambar 1. Berdasarkan gambar dan data yang disajikan, kita dapat melihat bahwa tingkat inflasi inti di Indonesia sangat berfluktuasi, pada Januari 2002 terjadi kenaikan hingga pada Mei 2002 mencapai 0,30 persen (data dapat dilihat pada lampiran) dan selanjutnya menurun hingga Juni 2002, setelah memasuki Juli 2002 inflasi inti cenderung meningkat hingga pada Januari 2003. Pada masa persiapan *Inflation Targeting* tingkat inflasi inti di Indonesia

berfluktuatif namun cenderung stabil masih berada pada kisaran rata-rata 0,5 persen. Hingga ditutup pada juni 2005 sebagai akhir dari masa persiapan *Inflation Targeting* yaitu sebesar 0,28 persen.



Sumber: Bank Indonesia, 2009

Gambar 1. Tingkat Inflasi Inti (*core inflation*) Periode 2002:01-2009:06

Pada awal masa penerapan *Inflation Targeting* justru inflasi inti mengalami kenaikan tertinggi, yaitu mencapai 2,85 persen pada Oktober 2005. Pada masa penerapan ini pergerakan inflasi inti lebih cenderung berfluktuatif dibandingkan pada tahun sebelum penerapan *Inflation Targeting framework* itu sendiri. Terjadi kenaikan yang signifikan dan begitu juga penurunannya, seperti pada tahun 2008, inflasi inti pada bulan April berada pada tingkat 0,72 persen lalu pada bulan Mei turun hingga mencapai minus 0,03 persen dan kemudian naik lagi pada bulan Juni menjadi 1,21 persen. Kejadian ini juga mungkin akibat pengaruh krisis global, namun pada puncak krisis global dunia pada bulan oktober 2008, inflasi inti justru cenderung stabil hingga bulan Juni 2009 ditutup dengan tingkat inflasi inti sebesar 0,20 persen.

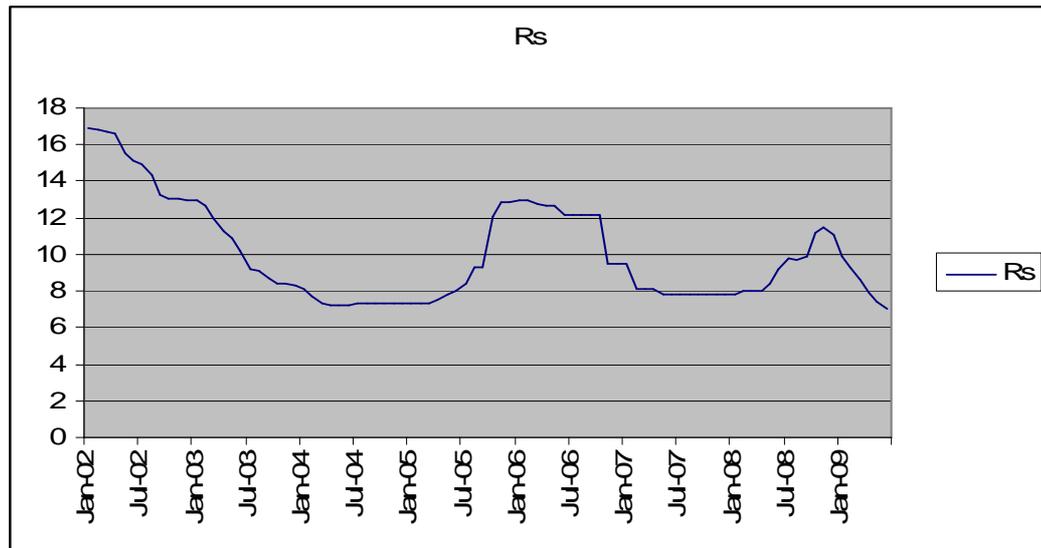
Inflasi bukan merupakan masalah yang sederhana menaikkan harga. Pada inflasi terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga inflasi menarik untuk diperhatikan. Masalah inflasi menjadi sangat sulit untuk dipahami karena banyaknya variabel yang mempengaruhi inflasi serta mengingat dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik pada suatu negara maka harus dicari sumber penyebab dan upaya menemukan solusinya.

Dalam mengatasi inflasi pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral. Kebijakan moneter Bank Indonesia mempunyai instrumen moneter antara lain Operasi Pasar Terbuka (OPT), intervensi rupiah, sterilisasi valuta asing, fasilitas diskonto, dan Giro Wajib Minimum (GWM).

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan salah satu instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang diterbitkan oleh BI. BI menetapkan tingkat suku bunga SBI sesuai dengan target yang diinginkan, yaitu target dimana terjadi kestabilan inflasi, sehingga sekaligus menimbulkan kestabilan ekonomi.

Pada grafik yang ada dalam Gambar 2 di bawah kita dapat melihat bahwa pergerakan tingkat suku bunga SBI cenderung stabil, terjadi kenaikan dan penurunan tingkat suku bunga, namun dalam pergerakannya tidak ada perubahan yang signifikan terjadi. Pada awal tahun 2002 tingkat suku bunga SBI cenderung menurun, hal ini terus berlanjut hingga pada Juni 2003 tingkat suku bunga SBI mencapai kisaran satu digit yaitu 9,53%. Pada tahun 2004 tingkat suku bunga bergerak secara stabil, namun dalam pergerakannya terjadi penurunan. Penurunan laju tingkat suku bunga SBI ini terus berlangsung hingga Mei 2004. Pada bulan

Juni 2004 sampai Januari 2005 terjadi fluktuasi namun cukup kecil, masih dapat dikatakan stabil. Pada Februari 2005 mulai terjadi kenaikan tingkat suku bunga SBI, dan pada September 2005 tingkat suku bunga SBI kembali mencapai kisaran dua digit, yaitu berada pada titik 10,00%. Kisaran dua digit ini bertahan hingga



Sumber: Bank Indonesia, 2009

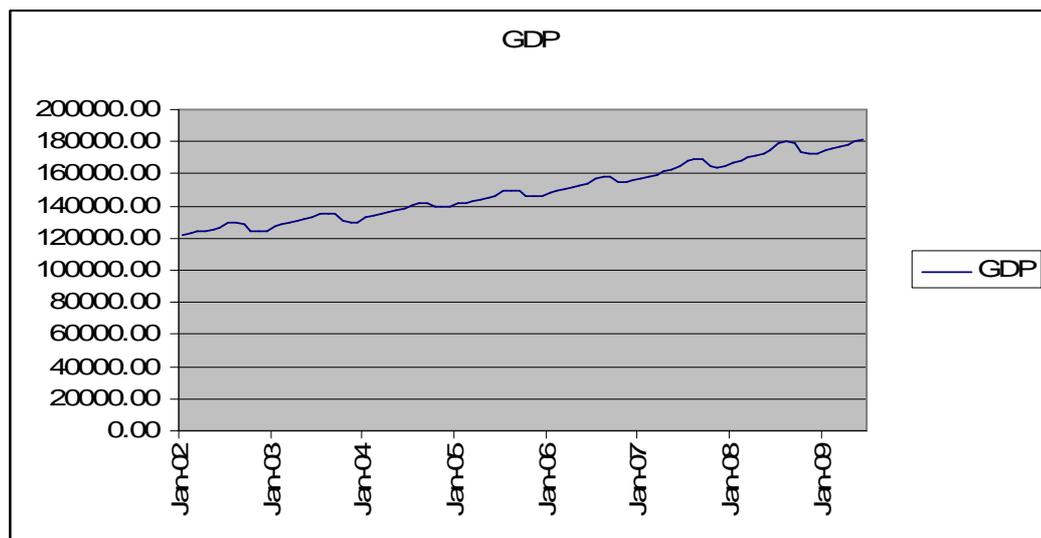
Gambar 2. Grafik Tingkat Suku Bunga (SBI) tahun 2002:01-2009:06

November 2006. Desember 2006 tingkat suku bunga SBI kembali pada kisaran satu digit. Pada tahun 2007 dari Januari sampai November tingkat suku bunga SBI tidak mengalami perubahan. Pada akhir tahun 2007 tingkat suku bunga SBI mengalami penurunan sebesar 0,25 % dari 8,25% menjadi 8,00%. Pada tahun 2008 terjadi fluktuasi terhadap tingkat suku bunga SBI, namun fluktuasi yang terjadi masih dalam batas normal. Hal ini terjadi karena pengaruh krisis finansial yang melanda Amerika mulai dirasakan pengaruhnya pula di Indonesia.

Puncaknya pada bulan November 2008 BI melakukan kebijakan moneter yaitu menaikkan tingkat suku bunga SBI menjadi 11,24% untuk menekan dan menanggulangi krisis finansial global ini. Hal ini dimaksudkan agar perputaran

uang tidak lari semua ke luar negeri. Kebijakan yang dilakukan BI ini sangat berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan bank-bank sentral lainnya yang cenderung menurunkan tingkat suku bunganya. Pada penutupan tahun 2008 tepatnya pada 31 Desember 2008 BI kembali menurunkan tingkat suku bung SBI menjadi 10,83% dan pada bulan Januari 2009 tingkat suku bung SBI kembali pada kisaran satu digit, yaitu 9,77%. Hal ini bertahan hingga Maret 2009, pada Maret 2009 Tingkat suku bunga SBI mencapai 8,21% terus turun hingga ditutup pada bulan Juni 2009 pada titik 6,95%.

Perkembangan PDB Indonesia selama tahun 2000:01- 2009:06 disajikan dalam Gambar 3 berikut. Secara keseluruhan grafik PDB diatas menunjukkan bahwa PDB kita terus mengalami kenaikan, walaupun adanya fluktuasi pada kenyataannya. Data diatas berada pada satuan miliar rupiah. Pada tahun 2002 terjadi kenaikan rata-rata PDB perbulannya, pada tahun ini rata-rata perbulannya mencapai Rp.1.014,82. Tahun tahun berikutnya pun secara keseluruhan



Sumber : Bank Indonesia

Gambar 3. Grafik PDB Indonesia Tahun 2002:01- 2009:06

pendapatan Indonesia mengalami peningkatan, walaupun ada sedikit fluktuasi namun masih dapat dikatakan stabil, karena tidak terjadi penurunan secara signifikan. Pada akhir 2008 dimana krisis global melanda dunia Indonesia pun mengalami dampaknya, terjadi penurunan pendapatan dari Rp.173425,7 pada bulan November menjadi Rp.168348,9 pada bulan Desember, namun hal ini terjadi terus menerus terbukti pada awal tahun yaitu Januari 2009 kembali pendapatan Indonesia mengalami peningkatan hingga Rp.6390,372 dan terus mengalami peningkatan hingga Juni 2009.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis penerapan konsep *Inflation Targeting* di Indonesia, dengan judul: “Analisis Pengaruh Penerapan *Inflation Targeting* terhadap Kebijakan Moneter di Bank Indonesia”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah disajikan di atas maka permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh penerapan kerangka *Inflation Targeting* terhadap kebijakan moneter di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan kerangka *Inflation Targeting* terhadap kebijakan moneter di Indonesia.

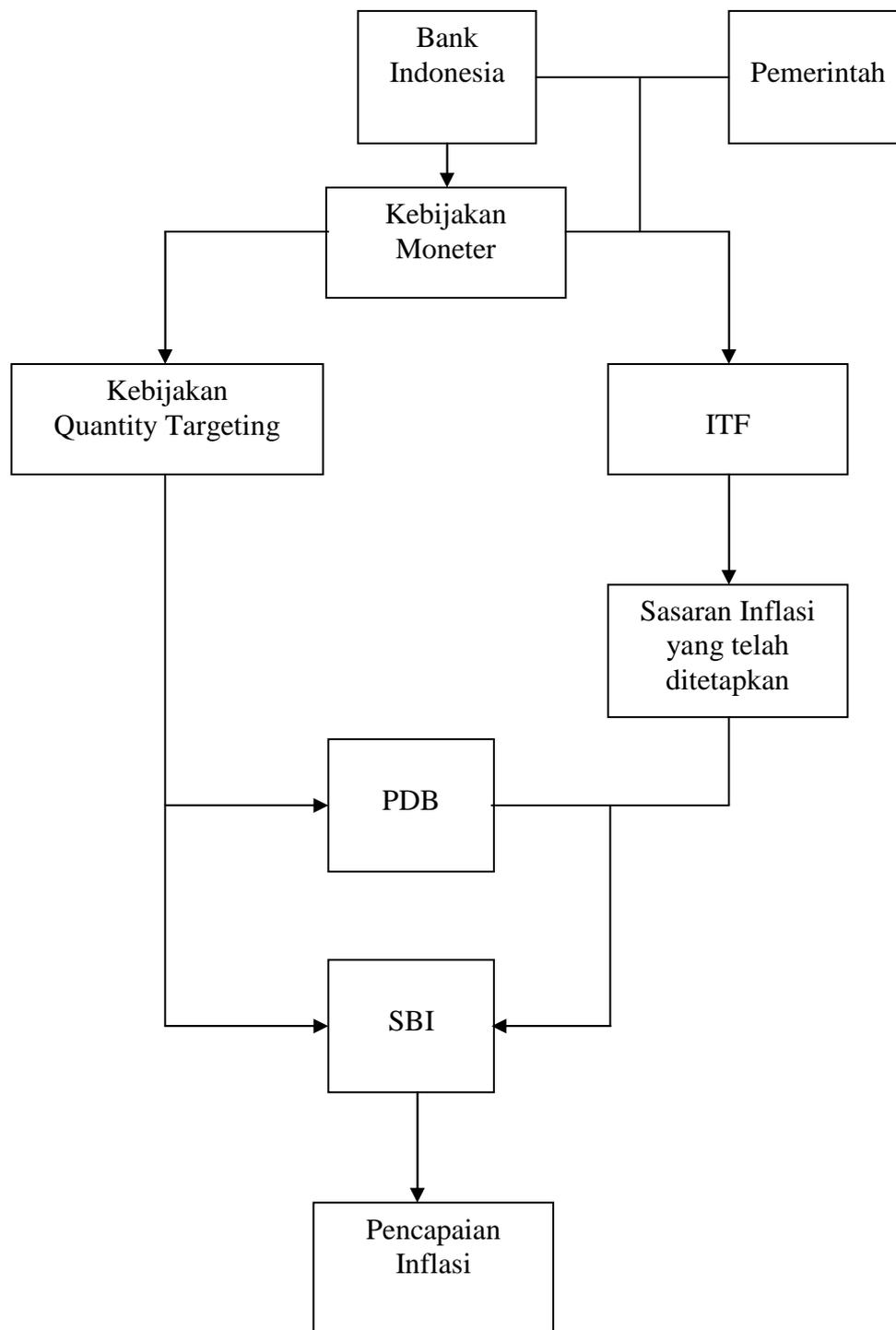
D. Kerangka Pemikiran

Bagan alur kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 4 di halaman berikut.

Operasi Pengendalian Moneter oleh BI

1. Berbeda dengan pelaksanaan selama ini yang menggunakan uang primer, sasaran operasional pengendalian moneter adalah BI Rate. Dengan langkah ini, sinyal kebijakan moneter diharapkan dapat lebih mudah dan lebih pasti dapat ditangkap oleh pelaku pasar dan masyarakat, dan karenanya diharapkan pula dapat meningkat efektivitas kebijakan moneter.
2. Pengendalian moneter dilakukan dengan menggunakan instrumen: (i) Operasi Pasar Terbuka (OPT), (ii) Instrumen likuiditas otomatis (*standing facilities*), (iii) Intervensi di pasar valas, (iv) Penetapan giro wajib minimum (GWM), dan (v) Himbauan moral (*moral suasion*).
3. Pengendalian moneter diarahkan pula agar perkembangan suku bunga PUAB berada pada koridor suku bunga yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian likuiditas sekaligus untuk memperkuat sinyal kebijakan moneter yang ditempuh BI.

Pada kebijakan moneter terdahulu dimana kebijakan moneter dengan menggunakan base money, BI sebagai pemegang kebijakan moneter di Indonesia yang bersifat independent tidak perlu berkoordinasi dengan pemerintah karena ditakutkan akan membuat kebijakan moneter tersebut menjadi tidak tepat sasaran namun dalam penerapan *inflation targeting*, BI harus berkoordinasi dengan



Gambar 4. Bagan Kerangka Pemikiran

pemerintah dalam menentukan sasaran inflasi yang akan ditentukan agar kebijakan yang diambil atau sasaran inflasi yang diambil tidak berpengaruh negatif atau berlawanan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Inflasi sebagai sasaran akhir tidak dapat ditetapkan secara sembarangan karena inflasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikkan yang terjadi hanya sekali saja bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 1987:25).

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan tingkat harga umum, baik barang dan jasa maupun faktor produksi. Jadi inflasi disini dapat ditandai oleh adanya nilai uang yang merosot, dimana merosotnya nilai uang tercermin dalam kenaikan harga barang-barang (Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1996:293).

Dalam mengatasi inflasi ini maka bank sentral selaku pengambil kebijakan moneter dalam pemerintahan melakukan beberapa cara salah satunya dengan menggunakan instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT). Operasi Pasar Terbuka secara umum memiliki arti sebagai pembelian atau penjualan surat-surat berharga oleh bank sentral dengan tujuan untuk mempengaruhi likuiditas pasar sehingga akan mempengaruhi kontraksi pada saat bank sentral menjual surat berharganya dan ekspansi pada saat bank sentral membeli kembali, begitu juga dengan BI. BI

menggunakan Operasi Pasar Terbuka sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan surat berharga yang dijual adalah Sertifikat Bank Indonesia atau lebih dikenal dengan nama SBI.

Pada masa sebelum menggunakan kebijakan *Inflation Targeting*, OPT dilakukan oleh bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi tanpa adanya penerapan sasaran inflasi terlebih dahulu, jadi sertifikat akan dikeluarkan oleh BI ketika melihat adanya perubahan atau pergeseran laju inflasi untuk menstabilkan inflasi.

Berbeda dengan penerapannya pada masa ketika kebijakan *Inflation Targeting* telah diterapkan oleh BI, sasaran inflasi terlebih dahulu telah ditetapkan dan variable-variabel yang akan mempengaruhi perubahan inflasi tersebut akan digunakan agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sehingga kestabilan inflasi lebih mudah untuk dijaga.

SBI hanyalah salah satu dari variable ekonomi yang digunakan dalam kebijakan BI untuk menjaga stabilitas inflasi. Dalam tulisan ini penulis juga menggunakan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel ekonomi yang akan mempengaruhi inflasi.

E. Hipotesis

Sesuai dengan kerangka pemikiran dan permasalahan yang telah dibahas maka hipotesis yang diajukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Diduga *Inflation Targeting* berpengaruh positif terhadap kebijakan moneter di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari :

- Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang penulisan, permasalahan, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori *Inflation Targeting*, jenis-jenis inflasi, efek inflasi, teori-teori inflasi, Sertifikat Bank Indonesia, dan PDB Indonesia.
- Bab III Metode Penelitian terdiri dari sumber data, batasan peubah, alat analisis dan pengujian hipotesis.
- Bab IV Hasil perhitungan dan pembahasan berisikan hasil perhitungan secara kuantitatif dan kualitatif.
- Bab V Simpulan dan saran yang berisikan simpulan secara keseluruhan mengenai penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran dari penulis berdasarkan penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran.